



Implementasi Laporan Berkelanjutan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman

Mamluatul Marzuqoh ^{1*}, dan Zulfatun Ruscitasari ²

¹ Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta, Sleman, Indonesia; e-mail : mamluatul.marzuqoh@gmail.com

² Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta, Sleman, Indonesia; e-mail : zzulfatunr@unu-jogja.ac.id

* Corresponding Author : Mamluatul Marzuqoh

Abstract: This research analyzes the implementation of sustainability reporting in the Sleman Regency Government with a focus on applying Global Reporting Initiative (GRI) standards in economic (GRI 200) and environmental (GRI 300). Through a descriptive qualitative approach, this study collected primary data from interviews with relevant officials and secondary data from policy documents such as the Regional Medium-Term Development Plan and regional financial reports. The results show that Sleman Regency has implemented sustainable economic aspects through stable economic growth, transparent procurement practices, and anti-corruption programs. In environmental aspects, there has been significant progress in waste management reaching 52.91% and proper access to domestic wastewater at 84.52%, although still facing challenges in optimizing environmental management facilities. The research concludes that the implementation of GRI-based sustainability reporting has the potential to improve transparency, accountability, and effectiveness of governance, as well as support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). It is recommended to enhance socialization of sustainable environmental management, optimize waste and wastewater management facilities, and strengthen evaluation mechanisms for sustainability programs.

Keywords: Sustainability Reporting; Global Reporting Initiative; Local Government; Transparency; Sustainable Development Goals

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi laporan berkelanjutan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan fokus pada penerapan standar Global Reporting Initiative (GRI) dalam aspek ekonomi (GRI 200) dan lingkungan (GRI 300). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer dari wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder dari dokumen kebijakan seperti RPJMD dan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah mengimplementasikan aspek ekonomi berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi stabil, praktik pengadaan transparan, dan program anti-korupsi. Dalam aspek lingkungan, terdapat kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah yang mencapai 52,91% dan akses layak air limbah domestik sebesar 84,52%, meskipun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan laporan berkelanjutan berbasis GRI berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Direkomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan, mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah, serta memperkuat mekanisme evaluasi program keberlanjutan.

Kata kunci: Laporan Berkelanjutan; Global Reporting Initiative; Pemerintah Daerah; Transparansi; Sustainable Development Goals

Received: May 28, 2025

Revised: June 8, 2025

Accepted: July 11, 2025

Published: July 12, 2025

Curr. Ver.: July 12, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global untuk mendorong setiap negara berperan aktif dalam berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial serta lingkungan (Hapsoro and Bangun 2020). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan global seperti krisis ekonomi, kesenjangan sosial, degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan serta strategi yang dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam berbagai kebijakan nasional dan internasional guna menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

Dalam perkembangan global, tren pelaporan keberlanjutan semakin luas, hal ini menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor (Adisti, Mukti, and Eprianto 2025). Pelaporan keberlanjutan kini menjadi praktik umum di banyak negara karena semakin tingginya kesadaran terhadap dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat (Ekasari, Eltivia, and Soedarso 2019). Laporan keberlanjutan tidak hanya digunakan oleh sektor bisnis tetapi juga oleh organisasi non-profit dan pemerintahan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan (Sawitri and Ardhiani 2023). Dengan adanya laporan keberlanjutan, pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai dampak serta kebijakan yang diterapkan dalam aspek ekonomi dan lingkungan.

Konsep keberlanjutan tidak hanya relevan bagi sektor bisnis tetapi juga berperan penting dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemerintahan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih transparan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Pratama and Soenaria 2024). Selain itu, dunia usaha juga semakin terdorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional maupun pelaporan, sehingga kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dengan mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi saat ini. SDGs hadir sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih inklusif. Tujuan utama SDGs adalah menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta melindungi lingkungan melalui kebijakan yang berkelanjutan (Miqdad and Izzalqurny 2019). Kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi permasalahan utama di banyak negara menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

SDGs merupakan sebuah agenda yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai panduan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs dikenal juga sebagai Tujuan Perkembangan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas (Agustin and Bastaman 2022). Dengan penerapan SDGs dalam strategi operasional dapat mendorong sektor untuk terlibat dalam praktik pengungkapan keberlanjutan yang lebih luas, hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemangku kepentingan serta akan berdampak pada peningkatan kinerja suatu sektor (Jihan and Murwaningsari 2023).

Implementasi SDGs dalam sektor pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja pembangunan, tetapi juga menjadi dasar bagi praktik pengungkapan keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelaporan keberlanjutan dalam sektor pemerintahan bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pencapaian SDGs (Resmadiktia, Utomo, and Aiman 2023). Dengan menerapkan standar pelaporan yang sesuai, seperti Global Reporting Initiative (GRI), pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi mengenai dampak kebijakan dan program yang telah dijalankan, khususnya dalam aspek ekonomi dan lingkungan (Ruscitasari, Marzuqoh, and Mutia 2025). Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Transparansi merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, karena masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap keterbukaan informasi terkait kebijakan, anggaran serta dampak program yang dijalankan oleh pemerintahan (Habibah and Soenaria 2024). Untuk memenuhi harapan ini, pelaporan keberlanjutan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai kinerja pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Basir, Ansari, and Fitriani 2024). Dengan adanya laporan berkelanjutan, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya serta perencanaan pembangunan. Keterbukaan informasi yang dihasilkan dari pelaporan keberlanjutan tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena mereka dapat melihat komitmen nyata dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Laporan berkelanjutan di pemerintahan daerah mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta implementasi kebijakan publik. Pelaporan keberlanjutan memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai dampak ekonomi, lingkungan serta sosial dari setiap program yang dijalankan (Amalia and Firmansyah 2024). Adanya laporan ini masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab. Selain itu, transparansi serta akuntabilitas yang ditingkatkan melalui laporan berkelanjutan juga dapat mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, karena setiap kebijakan dan proyek yang dilakukan dapat dipantau secara terbuka oleh pemangku kepentingan (Prastyo et al. 2024). Selain memperkuat transparansi, pelaporan keberlanjutan dalam pemerintahan daerah juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta menarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan suatu standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Standar ini memberikan panduan bagi organisasi dalam mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas mereka secara sistematis dan dapat diukur (Tusiyati 2019). Penerapan GRI dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan organisasi, termasuk pemerintah daerah, untuk menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan relevan bagi pemangku kepentingan (Jannah, Nuraina, and Yusdita 2021). Dengan standar GRI, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana kebijakan dan program mereka dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan serta dampak nyata yang dihasilkan dalam aspek ekonomi dan lingkungan.

Penerapan standar GRI dalam pelaporan keberlanjutan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintahan. Pelaporan yang sesuai dengan standar internasional tidak hanya membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, tetapi juga memberikan masyarakat akses terhadap informasi yang lebih transparan mengenai tata kelola pemerintahan (Priyanto and Bandyono 2024). Dalam pemerintahan daerah, standar GRI 200 (Ekonomi) dan GRI 300 (Lingkungan) dapat digunakan sebagai pedoman utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan. GRI 200 mencakup aspek ekonomi seperti dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi penggunaan anggaran, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, GRI 300 berfokus pada dampak lingkungan dari aktivitas pemerintahan, termasuk efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta kebijakan pengurangan emisi karbon.

Dalam menerapkan kedua standar ini, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keberlanjutan yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan berkelanjutan di tingkat pemerintahan, apa yang mempengaruhinya serta bagaimana dampaknya pada transparansi dan efisiensi tata kelola Pemerintahan. Penelitian ini akan menggali sejauh mana kesesuaian laporan yang dibuat dengan standar Global Reporting Initiative (GRI), khususnya pada aspek ekonomi (GRI 200) dan lingkungan (GRI 300). Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta dinamika sosial yang kompleks perlu mengadopsi laporan keberlanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam era di mana tuntutan akan keterbukaan informasi semakin meningkat, laporan keberlanjutan dapat menjadi alat yang efektif dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Teori Stakeholder

Teori stakeholder menekankan bahwa keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Stakeholder yaitu suatu kelompok atau individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi atau dipengaruhi dengan pencapaian tujuan organisasi (Damayanti and Hardiningsih 2021). Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan manajemen internal, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, hingga pemegang (Sawitri and Ardiani 2023). Perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak agar dapat mencapai keberlanjutan bisnis yang optimal. Konsep pemangku kepentingan ditempatkan sebagai elemen penting dalam manajemen strategis bertujuan memperkuat hubungan perusahaan dengan pihak berkepentingan yang berasal dari internal maupun eksternal, konsep ini berperan dalam pengembangan keunggulan kompetitif perusahaan (Kuswanto 2019). Dengan memperhatikan aspek ini, perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan meningkatkan reputasi bisnisnya di pasar. Oleh karena itu, teori stakeholder memberikan pemahaman bahwa transparansi informasi merupakan bagian integral dalam membangun kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan.

Dalam pemerintahan daerah, laporan berkelanjutan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, LSM, dan pemerintah pusat mengenai kebijakan serta program keberlanjutan yang sedang dijalankan. Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban yang komprehensif (Amaliyah and Andayani 2022). Dalam hal ini, perusahaan atau lembaga pemerintahan wajib menyampaikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai berbagai aktivitas yang dilakukan, sesuai dengan pandangan Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi secara transparan kepada pemangku (Romero, Ruiz, and Fernandez-Feijoo 2019). Dengan adanya keterbukaan informasi, perusahaan dan pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder serta menciptakan lingkungan yang lebih terpercaya dan berkelanjutan.

2.2 Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Konsep mengacu pada kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan serta kegagalan dalam pelaksanaan misi pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan sebelumnya, hal ini disampaikan melalui laporan yang disusun secara berkala (Auditya, Husaini, and Lismawati 2021). Akuntabilitas tidak hanya mencakup evaluasi kinerja secara internal, tetapi juga melibatkan penyampaian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, laporan akuntabilitas menjadi instrumen penting yang mencerminkan sejauh mana suatu organisasi menjalankan misinya secara efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan penyampaian informasi serta

pengungkapan aktivitas keuangan kepada stakeholder yang berkepentingan, sehingga dapat menilai kinerja serta kebijakan yang diterapkan (Nasution 2019).

Di sisi lain, transparansi menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas karena keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi memungkinkan publik untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan, keputusan, serta proses yang dilakukan oleh suatu organisasi (Rambu Ana and Ga 2021). Prinsip transparansi menekankan bahwa setiap entitas, terutama di sektor pemerintahan dan bisnis harus memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka agar dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Transparansi dapat diartikan sebagai prinsip untuk menjamin kebebasan semua pihak yang berkepentingan dalam mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan serta keterbukaan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait kepada pihak yang memerlukan (Mais and Palindri 2020). Dengan menerapkan transparansi secara konsisten, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya

2.3. Global Reporting Initiative GRI

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan standar utama yang digunakan dalam menyusun laporan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi. GRI didirikan pada tahun 1997, GRI merupakan organisasi internasional yang bersifat independen. GRI berperan dalam membantu bisnis dan berbagai entitas lainnya untuk mengambil tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan serta menyediakan bahasa global yang memudahkan komunikasi mengenai dampak tersebut (GRI 2023). Dalam menjalankan perannya, GRI menawarkan berbagai dukungan pelaporan secara lengkap yang berfokus untuk mengembangkan proses pelaporan yang menyeluruh dan penyusunan laporan yang komprehensif dan sistematis. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat menyampaikan informasi yang lebih jelas mengenai dampak operasional kepada pemangku kepentingan, sehingga mendukung terciptanya praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, pedoman ini memberikan dukungan dalam proses pelaporan yang menyeluruh, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas organisasi.

Menurut penelitian (Qisthi and Fitri 2021) GRI merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk menyusun laporan berkelanjutan suatu perusahaan, standar ini berfungsi sebagai panduan laporan berkelanjutan yang menyediakan informasi relevan serta dapat diandalkan dalam upaya mendukung pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. GRI dirancang sebagai kerangka kerja untuk membantu organisasi menyusun laporan yang berisi data penting mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.4. Laporan berkelanjutan

Laporan berkelanjutan merupakan suatu dokumen penting yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi bertujuan menjelaskan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan. Laporan ini memungkinkan perusahaan serta organisasi untuk mengukur, memahami, serta mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola yang baik (Meutia, K, and Si 2019). Laporan ini menjadi suatu sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Laporan berkelanjutan suatu laporan yang menguraikan dampak yang terjadi oleh aktivitas perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Martania Dwi Hapsari 2023).

Dalam praktiknya, perusahaan menerapkan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan serta memenuhi kewajiban dalam aspek hukum, ekonomi, etika dan kebijakan (Apriliyani, Farwitawati, and Nababan 2021) Transparansi dalam laporan ini menjadi sangat penting agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat menilai kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan global. Tujuan dari pelaporan keberlanjutan dengan standar GRI adalah untuk memastikan adanya transparansi terkait upaya organisasi dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Global Reporting Initiative 1 2023). Dengan menggunakan standar ini, perusahaan dapat

lebih terstruktur dalam menyusun laporan yang tidak hanya memenuhi kepatuhan regulasi, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, penerapan laporan berkelanjutan dengan standar GRI memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi laporan berkelanjutan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman. Menurut (Moleong 2021) pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang berfungsi untuk memberikan pemahaman atau arti terhadap masalah yang diteliti, penelitian ini memiliki telaah dan cakupan yang cukup luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses dan konteks kebijakan yang diterapkan, dengan mengandalkan data primer dari wawancara mendalam dengan pejabat atau staf terkait, serta data sekunder berupa dokumen resmi seperti RPJMD, laporan keuangan daerah, dan dokumen kebijakan lainnya. Kedua jenis data ini digunakan untuk mencerminkan konsistensi antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara, dengan acuan standar Global Reporting Initiative (GRI) 200 (Ekonomi) dan 300 (Lingkungan) untuk menilai aspek keberlanjutan telah diintegrasikan dalam laporan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi DIY Yogyakarta dan memegang peran dalam pembangunan wilayah. Dengan luas wilayah sekitar 574,82 km², Sleman terdiri atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Dalam aspek ekonomi, Sleman menunjukkan pertumbuhan yang stabil yang didorong oleh sektor jasa, perdagangan, pertanian, serta industri kecil dan menengah. Dan untuk sisi lingkungan, Sleman memiliki tantangan geografis sehingga perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, Kabupaten Sleman telah mengintegrasikan elemen-elemen keberlanjutan ke dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan, termasuk melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan keuangan daerah, serta inisiatif menuju pelaporan keberlanjutan berbasis Global Reporting Initiative (GRI).

4.2. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi keberlanjutan berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap kondisi ekonomi para pemangku kepentingan serta sistem ekonomi mereka, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Global Report Initiative 2023). GRI 200 berfokus pada indikator-indikator seperti kinerja ekonomi (GRI 201), keberadaan pasar (GRI 202), dampak ekonomi tidak langsung (GRI 203), praktik pengadaan (GRI 204) yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, anti korupsi (GRI 205), serta anti persaingan (GRI 206).

a. GRI 201 – kinerja ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sleman memiliki lima pendukung yang terdiri dari industri pengelolaan, konstruksi, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Perekonomian Kabupaten Sleman pada

tahun 2022 didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 12,56%, konstruksi sebesar 11,53%, dan informasi dan komunikasi sebesar 10,47%. Jika dilihat dari kontribusi sektor PDRB yang terbesar yaitu sektor industri pengolahan, merupakan peluang yang besar untuk terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbasis UMKM.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB tiga tahun yakni tahun 2020 sebesar -4.05% mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun 2019 sebesar 6,48%. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020.

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi di daerah tersebut. Hasil dari wawancara menyatakan bahwa dukungan keuangan dari pemerintah memberikan pengaruh positif yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, berkurangnya angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang naik. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sleman meningkat cukup signifikan mencapai angka 5,61% dan pada tahun 2022 mencapai 5,15%.

Di samping itu, dalam merespons perubahan iklim, pemerintah daerah mengimplementasikan strategi adaptasi di sektor pertanian seperti "penyesuaian pengelolaan tanaman" serta pengontrolan hama untuk mempertahankan hasil pertanian. Ini merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian iklim yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan penghasilan petani.

b. GRI 202- Keberadaan Pasar

Pada indikator GRI 202 ini meliputi rasio standar upah dan kebijakan kompensasi sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman menggunakan kebijakan pengupahan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan regulasi provinsi dan mempertimbangkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) setiap tahunnya berdasarkan kebijakan provinsi, dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi, serta perkembangan ekonomi. Namun, saat ini belum ada informasi yang menjelaskan perbandingan rasio gaji antara pegawai tingkat bawah dan manajemen atau indikator keragaman pekerja dalam laporan keberlanjutan.

c. GRI 203 – Dampak ekonomi tidak langsung

Dalam pengungkapan GRI 203, fokus utama adalah pada bagaimana kebijakan dan aktivitas pemerintah memberikan dampak ekonomi tidak langsung terhadap masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur, penciptaan peluang ekonomi baru, serta pembangunan kapasitas ekonomi lokal.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sleman 2021–2026, sejumlah program strategis telah dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Salah satunya adalah pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, yang tidak hanya meningkatkan akses terhadap kebutuhan pokok tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan desa dan konektivitas antar wilayah juga mendorong distribusi hasil pertanian dan produk lokal secara lebih efisien, sehingga memperluas peluang pasar bagi masyarakat pedesaan

d. GRI 204 – Praktik Pengadaan

Salah satu aspek penting dalam pelaporan GRI 200 adalah bagaimana entitas publik mendorong pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan partisipasi

pelaku ekonomi lokal. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mencantumkan prinsip pemberdayaan UMKM lokal dalam proses pengadaan.

Dalam prosedur pengadaan di Kabupaten Sleman telah mengikuti pedoman dari LKPP, terutama Perpres No. 12 Tahun 2021, dan didukung dengan adanya UKPBJ serta penerapan e-catalog, e-purchasing, dan Inaproc versi 6. Di samping itu, pelatihan untuk sertifikasi kompetensi juga diadakan untuk staf pengelola keuangan daerah sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh narasumber : "Proses pengadaan sesuai dengan aturan LKPP yaitu Perpres No.12 tahun 2021. Di sleman telah dibentuk UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa). Dalam hal ini kami juga telah menggunakan e-catalog serta purchasing. Selain itu PPKOM telah memiliki akun Inaproc versi 6" (N.K).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengimplementasikan digitalisasi di dalam sistem pengadaannya untuk mencegah kolusi dan meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah. Dengan hadirnya UKPBJ sebagai pusat layanan pengadaan, serta pemanfaatan aplikasi seperti Inaproc dan e-catalog, proses pengadaan kini menjadi lebih transparan dan tercatat dengan baik. Di samping itu, narasumber juga menyebutkan bahwa para pengelola anggaran dan pengadaan telah menjalani pelatihan: "Kami mengikuti diklat untuk sertifikasi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah" (N.K.). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengadaan publik, yang merupakan elemen penting untuk mempertahankan integritas dalam proses pengadaan.

e. GRI 205 – Anti Korupsi

Dalam pedoman GRI 205, diharapkan organisasi melaporkan tindakan yang diambil untuk mencegah korupsi, memberikan pelatihan anti-korupsi, serta melakukan penilaian risiko setiap bagian. Pemerintahan Kabupaten Sleman telah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan pemerintahan yang transparan dan integritas, hal ini merupakan suatu elemen dari prinsip keberlanjutan sosial serta tata kelola yang baik.

Dalam pelaksanaan pengendalian korupsi, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan pemetaan risiko fraud melalui registrasi risiko yang disusun oleh setiap OPD dan dievaluasi oleh Inspektorat. Hal ini disampaikan oleh narasumber : "Kita telah membuat pemetaan risiko fraud atas kegiatan-kegiatan, memproses tindak pidana korupsi yang berasal dari aduan, pengembangan hasil audit. Dalam penilaian resiko OPD membuat regis resiko yang kemudian akan di evaluasi oleh inspektorat dan akan diterbitkan oleh LHE (Laporan Hasil Evaluasi)"(I.N)

Selain itu, proses penanganan laporan korupsi telah dilakukan sesuai dengan prosedur ASN. Hal ini disampaikan oleh narasumber : "Jika ada temuan maka akan dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, semisal ada temuan disetor atau dikembalikan semisal kerugian negara maka akan diproses dengan sesuai aturan disiplin ASN"(I.N)

Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, tetapi belum tersedianya laporan yang sistematis dan rutin mengenai data seperti jumlah kasus ataupun langkah-langkah yang diambil belum tersedia. Hal ini mempersulit dalam penilaian kebijakan anti-korupsi yang diterapkan.

f. GRI 206 – Anti Persaingan

Pengungkapan GRI 206 berfokus pada organisasi untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan persaingan seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan kekuasaan pasar. Indikator ini biasanya diterapkan di sektor swasta atau perusahaan, tetapi di Pemerintahan daerah juga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pemberdayaan UMKM setempat.

Dalam mendukung prinsip transparansi dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan, indikator GRI 206 mengenai Anti Persaingan Tidak Sehat menjadi sangat penting untuk dicermati. Berdasarkan hasil wawancara, sampai saat ini belum ada laporan atau tanda-tanda adanya praktik monopoli, kartel, atau persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh narasumber :” Sejauh ini tidak ada kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang masuk ke kami” (I.N)

Hal ini dapat menandakan bahwa prosedur pengadaan yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan mendukung persaingan yang sehat. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak adanya laporan bukan berarti praktik yang tidak sehat tidak terjadi. Ini bisa menunjukkan adanya keterbatasan dalam saluran pengaduan atau minimnya kesadaran serta partisipasi masyarakat luar dalam melaporkan kemungkinan pelanggaran

4.3. Aspek Lingkungan

GRI 300 menekankan pentingnya pelaporan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi, termasuk penggunaan energi, emisi, dan pengelolaan limbah. Dalam konteks pemerintah daerah, indikator-indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan telah mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

a. GRI 301 – Material

Pengungkapan GRI 301 berfokus pada pentingnya efisiensi dalam pemakaian sumber daya alam, penggunaan material yang berkelanjutan, serta usaha dalam mengurangi limbah melalui daur ulang dan penggunaan ulang material. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini berkaitan dengan pengelolaan pembangunan infrastruktur serta program pengelolaan limbah yang terintegrasi.

Kabupaten Sleman belum menyusun laporan mengenai volume material yang digunakan, persentase material daur ulang, atau efisiensi material dalam proyek-proyek secara terstruktur. Untuk keseluruhan, Kabupaten Sleman telah mewujudkan komitmen terhadap pengelolaan material yang berkelanjutan melalui program pengelolaan sampah serta pemanfaatan bahan local.

b. GRI 302 – Energi

Kabupaten Sleman memiliki daya listrik terpasang mencapai 605.103.000 VA dengan produksi listrik sebesar 1.490.805 kW. Meskipun jaringan listrik PLN telah tersedia untuk setiap rumah di Kabupaten Sleman, masih ada beberapa rumah yang tidak dapat mengaksesnya, terutama di daerah terpencil dan pemukiman baru. Untuk menyediakan listrik bagi yang tidak dapat mengaksesnya, pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan energi surya dan biogas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kabupaten wewenang untuk memilih energi dan sumber daya mineral.

Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, proporsi RTH pada wilayah perkotaan sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah areal yang tertutup pohon sehingga kualitas lingkungan dapat meningkat baik secara lokal, regional maupun global.

c. GRI 303 – Air dan efluen

Sumber daya air di Kabupaten Sleman meliputi air hujan, air permukaan, serta air tanah. Air permukaan merupakan air sungai yang bersumber dari mata air di lereng Gunung Merapi. Jumlah mata air secara keseluruhan yang tersebar di Kabupaten Sleman berjumlah 182, namun hanya kisaran 150 mata air yang masih aktif. Sistem penyediaan air minum perpipaan wilayah pedesaan di Kabupaten Sleman dimulai pada tahun 1996 dengan menggunakan Sistem Penyediaan Air Bersih (SIPAS). SPAMDES saat ini sejumlah 359 lokasi berada di 15 Kecamatan.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu layanan air serta pengelolaan limbah rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun Strategi Sanitasi dan Penyediaan Air Minum 2026–2030. Strategi ini diperbaharui setiap lima tahun dan didasarkan pada estimasi kebutuhan air serta jumlah penduduk. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber : “...Strategi sanitasi dan air minum dibuat per 5 tahun. Dalam perencanaan ini, data pertama yang dibutuhkan adalah prediksi jumlah penduduk, karena dalam menghitung air limbah kita akan menghitung pemakaian air bersih per orang, per liter” (H.K.)

Tiga indikator kualitas lingkungan digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA merupakan survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter di beberapa titik. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Pengujian dilakukan pada 60 titik lokasi di 11 sungai. Indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah 41,33 dengan kategori kurang baik. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kadar BOD, COD, coliform total, deterjen dan minyak/lemak. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan.

Untuk sektor air minum, meskipun akses layanan telah mencapai 100%, namun akses aman melalui Perumdam masih rendah, hanya sebesar 11,22%. Sebagian besar penduduk (88,78%) memiliki akses layak namun belum aman. Sistem pelayanan air minum masih didominasi oleh bukan jaringan perpipaan (78,83%), sementara jaringan perpipaan hanya mencakup 21,17%. Perumdam Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman baru melayani 42.417 KK dari total 377.909 KK, dengan tingkat pelayanan tertinggi di Kapanewon Gamping (46,34%) dan terendah di Kapanewon Seyegan (0,27%). Untuk mengatasi permasalahan di atas, Kabupaten Sleman telah menyusun Strategi Sanitasi dan Air Minum tahun 2026-2030. Untuk pengelolaan air limbah domestik, strategi yang diambil meliputi pemisahan lembaga operator dan regulator, pencapaian akses layak 100% pada tahun 2030, peningkatan akses aman menjadi 35%, optimalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, penambahan SR IPAL Regional Sewon hingga 5.000 SR, serta optimalisasi kinerja IPAL Komunal, kawasan wisata, dan sekolah.

d. GRI 304 – Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis yang unik, membentang dari dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di bagian selatan hingga dataran tinggi dengan titik tertinggi di puncak Gunungapi Merapi. Wilayah Kabupaten Sleman menjadi habitat berbagai ekosistem penting, meliputi kawasan lereng Gunungapi Merapi dan sistem perairan yang menjadi koridor ekologis utama. Pemerintah daerah telah menetapkan zonasi khusus untuk perlindungan keanekaragaman hayati, membagi wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya, dengan zona utara/lereng Gunungapi Merapi ditetapkan sebagai kawasan konservasi sumber daya air dan ekowisata. Program konservasi kawasan resapan air dikembangkan terintegrasi dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak. Upaya perlindungan keanekaragaman hayati juga tercermin dalam pengembangan Strategi Sanitasi dan Air Minum 2026-2030 yang memasukkan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan air dan penanganan limbah. Tantangan utama yang dihadapi adalah pertumbuhan permukiman yang cepat, terutama di kawasan perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengembangkan program "Sleman Hijau" yang mengintegrasikan perlindungan habitat dengan pengembangan kawasan hijau perkotaan, serta melakukan rehabilitasi kawasan kritis dan kawasan lindung di daerah tangkapan sungai dan danau, dengan alokasi dana sebesar 750 juta rupiah per tahun untuk periode 2026-2030.

e. GRI 305 – Emisi

Kabupaten Sleman telah mengembangkan kebijakan pengelolaan emisi yang komprehensif sebagai bagian dari komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim dan perlindungan kualitas udara. Melalui implementasi strategi pengelolaan persampahan yang terintegrasi, pemerintah daerah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pengelolaan limbah. Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan sampah mencapai 52,91% dari total timbulan, yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana dari pembusukan sampah organik. Program unggulan dalam pengurangan emisi meliputi pengembangan 310 bank sampah dan 41 unit TPS3R yang secara efektif mengurangi jumlah sampah organik yang terurai di tempat pemrosesan akhir. Selain itu, melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kabupaten Sleman telah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat dengan 176 unit IPAL Komunal yang melayani 12.904 kepala keluarga, IPAL Kawasan di Berbah dan Depok, serta IPAL Regional Sewon yang signifikan mengurangi emisi metana dari limbah cair. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemisahan sampah organik dan anorganik, dimana hanya 16,05% rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah untuk didaur ulang. Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan emisi melalui investasi strategis dalam sektor persampahan sebesar 226,67 miliar rupiah dan sektor air limbah sebesar 87,74 miliar rupiah selama periode 2026-2030, dengan target pengelolaan sampah 100% dan pengurangan emisi yang signifikan melalui peningkatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

f. GRI 306 – Limbah

Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman bertujuan untuk penanganan pencemaran limbah. Pengelolaan yang dilakukan seperti black water ditampung diolah di IPAL komunal, kemudian effluennya di buang ke sungai. Sedangkan limbah dari kamar mandi dan cucian dapur dan pakaian langsung dibuang ke sungai. Black water maupun grey water langsung disalurkan ke unit pengolahan IPAL Kawasan atau Regional dengan system perpipaan, dan effluennya di buang ke sungai, masyarakat yang terkoneksi dengan saluran air limbah ini dikenakan retribusi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik di daerah ini telah mencakup dua pendekatan utama, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T). Data tahun 2023 mengungkapkan bahwa cakupan SPALD-S telah mencapai 95,43%, dengan rincian 92,53% melalui sistem individual dan 2,90% melalui sistem bersama. Sementara itu, SPALD-T mencapai 4,57%, dengan distribusi 3,35% melalui skala permukiman berbasis masyarakat (IPAL Komunal), 0,21% melalui skala permukiman berbasis instansi (IPAL Kawasan), dan 1,00% melalui skala perkotaan/terpusat.

Dari perspektif akses layanan, data menunjukkan bahwa 84,52% penduduk Kabupaten Sleman telah memiliki akses layak terhadap pengelolaan air limbah domestik, dengan 24,30% diantaranya merupakan akses aman dan 60,22% merupakan akses layak. Menariknya, terjadi peningkatan signifikan pada akses aman, dari hanya 15,33% pada tahun 2015 menjadi 25,67% pada tahun 2023. Meski demikian, masih terdapat 15,48% penduduk yang belum memiliki akses layak. Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Lembaga operator dan regulator masih belum terpisah, sekitar 2.383 keluarga masih menggunakan jamban dengan tangki septik yang belum layak, dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) belum berjalan optimal. Selain itu, IPAL Regional Sewon masih jauh dari target kapasitas, dengan pencapaian hanya 3.867 SR dari target 33.000 SR. Kinerja IPAL Komunal juga belum optimal, demikian pula dengan pengelolaan air limbah di kawasan wisata dan sekolah.

Dalam hal persampahan, Kabupaten Sleman telah menunjukkan kemajuan dengan tingkat pengelolaan sampah mencapai 52,91% pada tahun 2023, meningkat signifikan dari 26,33% pada tahun 2015. Pengelolaan ini terdiri dari pengurangan sampah sebesar 8,31% dan penanganan sampah sebesar 44,60%. Potensi timbulan sampah di Kabupaten Sleman mencapai 601,80 ton/hari, dengan komposisi 46,49% sampah organik, 32,77% sampah plastik, dan 17,08% sampah kertas. Dari total timbulan tersebut, 498,50 ton/hari berasal dari wilayah perkotaan dan 103,30 ton/hari dari wilayah perdesaan. Tantangan baru muncul setelah adanya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah pada Oktober 2023, yang mengakibatkan penghentian pengelolaan sampah secara regional. Beberapa fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST Minggir, TPST Taman Martani, dan beberapa TPS3R belum berfungsi optimal. Selain itu, masih terdapat kekurangan TPST sebagai pengganti pemrosesan akhir Piyungan, serta belum optimalnya transfer depo dan bank sampah unit.

Untuk mendukung implementasi strategi, Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 428,84 miliar untuk periode 2026-2030, dengan rincian Rp 87,74 miliar untuk sektor air limbah domestik, Rp 226,67 miliar untuk sektor persampahan, dan Rp 114,43 miliar untuk sektor air minum. Sumber pendanaan utama berasal dari APBD Kabupaten Sleman (54,92%), APBN (28,59%), APBD Provinsi (7,83%), Swasta/CSR (5,79%), dan Masyarakat (2,87%). Penerapan laporan berkelanjutan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman memiliki prospek yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan mengadopsi standar GRI, khususnya GRI 200 (Ekonomi) dan GRI 300 (Lingkungan), Kabupaten Sleman dapat menyajikan laporan yang komprehensif mengenai pencapaian dan tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.

4.4. Pembahasan

4.4.1 Implementasi GRI 200 – Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sleman secara umum telah menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan laporan akuntansi khususnya pada aspek ekonomi sesuai dengan standar GRI 200. Namun demikian, jika dilihat secara lebih rinci dari masing-masing indikator dalam GRI 200, belum seluruhnya informasi yang dipersyaratkan dapat disampaikan secara lengkap dan terstruktur dalam laporan atau dokumen terkait.

Jika dilihat berdasarkan tiap indikator, GRI 201 (Kinerja Ekonomi), GRI 204 Praktik Pengadaan), dan GRI 205 (Anti Korupsi) adalah indikator pengungkapan yang telah diterapkan dan disampaikan dengan lebih mendetail oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dibandingkan dengan indikator lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, stabilitas kinerja ekonomi daerah, tata kelola pengadaan yang transparan, serta upaya pencegahan korupsi. Kinerja ekonomi merupakan indikator yang mengalami perubahan, indikator ini menjelaskan keuntungan atau tingkat hasil perusahaan (Dewi Nawangsari and Nugroho 2019). Sedangkan Praktik pengadaan juga menjadi sorotan penting karena sektor ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan efisiensi anggaran (Purwadi, Barang, and Jasa 2019). Selanjutnya, anti-korupsi merupakan aspek yang sangat penting, khususnya dalam publik, karena berhubungan langsung dengan integritas pengelolaan, penggunaan anggaran yang efisien, dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan identifikasi risiko penipuan melalui pendaftaran risiko OPD, serta menanggapi temuan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan disiplin ASN.

Di sisi lain, item pengungkapan GRI 202 (Keberadaan Pasar), GRI 203 (Dampak Ekonomi Tidak Langsung), dan GRI 206 (Anti Persaingan Tidak Sehat) masih belum disajikan secara lengkap oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam dokumen resmi pelaporan keberlanjutan atau laporan tahunan lainnya. Meskipun terdapat praktik atau kebijakan yang dijalankan di lapangan, namun pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai dengan indikator-indikator yang dipersyaratkan dalam standar GRI. Sebenarnya, salah satu maksud utama dari penerapan standar GRI adalah untuk memperbaiki perbandingan dan keselarasan laporan keberlanjutan antara berbagai entitas di negara dan sektor yang berbeda (Chaerani, Juliyanto, and Firmansyah 2024).

4.4.2. Implementasi GRI 300 – Lingkungan

Berdasarkan hasil, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menggabungkan prinsip sustainability dalam hal lingkungan melalui berbagai kebijakan dan program untuk pengelolaan sumber daya alam, energi, dan limbah. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen RPJMD, Strategi Sanitasi dan Air Minum, serta hasil wawancara yang menunjukkan adanya komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Meskipun demikian, ketika ditinjau menurut standar GRI 300, tidak semua indikator lingkungan telah diungkap secara menyeluruh dan terstruktur.

Beberapa indikator seperti GRI 303 (Air dan Efluen) dan GRI 306 (Limbah) telah dilaporkan dengan baik, baik dalam bentuk program maupun data yang bersifat kuantitatif, termasuk cakupan SPALD-S dan SPALD-T, strategi sanitasi, serta volume pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk sektor pengelolaan sampah, air limbah, dan penyediaan air minum, serta mengembangkan program SPAMDES dan IPAL Komunal. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis keberlanjutan lingkungan telah dilakukan secara aktif.

Di sisi lain, informasi mengenai indikator GRI 301 (Material), GRI 302 (Energi), GRI 304 (Keanekaragaman Hayati), dan GRI 305 (Emisi) masih belum disajikan dengan rapi dalam laporan keberlanjutan. Data tentang jumlah material yang digunakan, efisiensi energi, dan penghitungan emisi karbon belum tersedia atau hanya terbatas pada penjelasan umum tentang kebijakan. Contohnya, meskipun ada program untuk menggunakan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan biogas, tidak ditemukan data mengenai penggunaan energi per tahun atau upaya untuk efisiensinya yang dilaporkan sesuai dengan pedoman GRI.

4.5. Laporan Berkelanjutan

Penerapan laporan berkelanjutan di sektor pemerintahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik, efektivitas kebijakan, dan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Laporan keberlanjutan tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menunjukkan transparansi, tetapi juga sebagai alat yang strategis untuk menilai dan meningkatkan arah pembangunan yang berkelanjutan (Global Reporting Initiative 1 2023). Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang mencerminkan dimensi ekonomi dan lingkungan sebagaimana tercakup dalam standar GRI 200 dan GRI 300. Namun demikian, pengungkapan laporan secara formal dan sistematis masih perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip pelaporan GRI.

Penerapan pelaporan keberlanjutan di Kabupaten Sleman telah berjalan pada tataran kebijakan dan implementasi teknis, namun masih perlu diperkuat dari sisi dokumentasi dan pelaporan sistematis agar sejalan dengan prinsip dan struktur standar GRI yang berlaku secara internasional. Penguatan kapasitas SDM, penyusunan format laporan yang terstandar, serta pelibatan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan di masa mendatang.

Laporan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi seperti dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi penggunaan anggaran, serta penciptaan lapangan kerja, dan aspek lingkungan seperti efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan kebijakan pengurangan emisi karbon. Adanya laporan keberlanjutan juga dapat menarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah daerah yang secara konsisten melaporkan dampak kebijakan dan programnya terhadap lingkungan dan sosial akan lebih dipercaya oleh investor dan donor yang memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menginisiasi langkah-langkah penting dalam mengimplementasikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan standar Global Reporting

Initiative (GRI), khususnya GRI 200 (Ekonomi) dan GRI 300 (Lingkungan), pemerintah daerah telah mengintegrasikan berbagai aspek ke dalam kebijakan dan program pembangunan.

Implementasi laporan berkelanjutan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam aspek ekonomi (GRI 200), Kabupaten Sleman telah menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan setelah pemulihan dari pandemi COVID-19, mencapai 5,15% pada tahun 2022. Praktik pengadaan telah dilakukan secara transparan melalui pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan pemanfaatan e-catalog sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program anti-korupsi juga diterapkan dengan pemetaan risiko fraud dan mekanisme pengaduan yang jelas.

Dalam aspek lingkungan (GRI 300), terdapat beberapa pencapaian signifikan seperti peningkatan pengelolaan sampah yang mencapai 52,91% pada tahun 2023, pengelolaan air limbah domestik yang mencapai 84,52% akses layak, dan pengembangan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar. Namun, tantangan masih terlihat pada optimalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL dan TPS3R, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 428,84 miliar untuk periode 2026-2030.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi pelaporan keberlanjutan di Kabupaten Sleman telah menunjukkan kemajuan yang berarti, masih diperlukan perbaikan dalam hal penyusunan laporan yang terstandar, pelibatan pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini penting agar praktik pendaftaran tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi alat strategi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Daftar Pustaka

- [1] Adisti, Aprilia Zahra, Aloysius Harry Mukti, and Idel Eprianto. 2025. "Pengaruh Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Variabel Pemoderasi Ukuran Perusahaan (Emiten Energy Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)." *Jurnal Riset Ilmiah* 2.
- [2] Agustin, Agni Agustin, and Widia Nur Utami Bastaman. 2022. "Pengembangan Desain Pakaian Outerwear Sebagai Penunjang Aktivitas Komunitas Strong Nation Di Kota Bandung." *Moda* 4(2): 41–58.
- [3] Amalia, Rizky, and Amrie Firmansyah. 2024. "Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(3): 452–62.
- [4] Amaliyah, Amiroh Nur, and Wuryan Andayani. 2022. "Pengungkapan Sdgs Pada Laporan Keberlanjutan PT Petrokimia Gresik Berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI) Periode 2018-2020." *Tema* 23(2): 108–19.
- [5] Apriliyani, Ika Berty, Reni Farwitawati, and Ria Apriani Nababan. 2021. "Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 4(2): 136–45.
- [6] Auditya, Lucy, Husaini Husaini, and Lismawati Lismawati. 2021. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Fairness* 3(1): 21–42.
- [7] Basir, Indra, Muhammad Ihsan Ansari, and Nur Fitriani. 2024. "Urgensi Sustainability Reporting Pada Pemerintah Daerah : Sebuah Analisis Studi Wacana *Jurnal Proaksi Urgensi Sustainability Reporting Pada Pemerintah Daerah : Sebuah Analisis Studi Wacana.*" (December).
- [8] Chaerani, Eva Yunadia, Dwi Juliyanto, and Amrie Firmansyah. 2024. "Evaluasi Laporan Keberlanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Reporting Initiative (Gri) 200." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(2): 305–16.
- [9] Damayanti, Alvina, and Pancawati Hardiningsih. 2021. "Determinan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22(1): 175.
- [10] Dewi Nawangsari, Rima, and Ika Nugroho. 2019. "Pengaruh Indikator Kinerja Ekonomi, Indikator Kinerja Lingkungan Dan Indikator Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur." *International Journal of Social Science and Business* 3(2): 162–68.
- [11] Ekasari, Kurnia, Nurafni Eltivia, and Elvyra Handayani Soedarso. 2019. "Analisis Konten Terhadap Pengungkapan Etika Dan Integritas Pada Sustainability Reporting." *Journal of research and application: accounting and management* 4(1): 95–105.
- [12] Global Reporting Initiative. 2023. "GRI 1 - Landasan 2021." *Globalreporting.Org* 101: 42.
- [13] GRI. 2023. "The GRI Standards - Enabling Transparency on Organizational Impacts." *Global Reporting Initiative.*

- [14] Habibah, Nadia, and Syaiful Soenaria. 2024. "Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3(3): 316–39.
- [15] Hapsoro, Nur Arief, and Kresensia Bangun. 2020. "The Development of Sustainable Development Seen from an Economic Aspect in Indonesia." *Lakar: Jurnal Arsitektur* 3(2): 88–96.
- [16] Jannah, Annisa Nur, Elva Nuraina, and Elana Era Yusdita. 2021. "Laporan Berkelanjutan Pt Xyz Dan Realitanya." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2(1): 48–74.
- [17] Jihan, Sofi, and Etty Murwaningsari. 2023. "Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan Dan Laporan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Biaya Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3(2): 3103–14.
- [18] Kuswanto, Randy. 2019. "Penerapan Standar GRI Dalam Sustainability Report Di Indonesia: Sebuah Evaluasi." *Jurnal Bina Akuntansi* 6(2): 1–21.
- [19] Mais, Rimi Gusliana, and Lini Palindri. 2020. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1(1): 57.
- [20] Martania Dwi Hapsari. 2023. "Analisis Penerapan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Terhadap Nilai Perusahaan." *Akuntansi* 45 4(1): 65–72.
- [21] Meutia, Farah, Farida Titik K, and M Si. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)." 6(2): 3543–51.
- [22] Miqdad, Muhammad, and Tomy Rizky Izzalqurny. 2019. "Urgensi Implementasi Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reports) Di Perguruan Tinggi." 13(3): 181–88.
- [23] Moleong, Lexy J. 2021. "Metodologi Penelitian Kualitatif." In Bandung: Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021.
- [24] Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. "Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan." *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 149–62.
- [25] Prastyo, Yudi et al. 2024. "Penerapan Etika Profesi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik : Implikasi Terhadap Akuntabilitas." 7: 18820–30.
- [26] Pratama, Juan Hendrian, and Syaiful Rahman Soenaria. 2024. "Pengungkapan Kinerja Sosial Pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung) Syaiful Rahman Soenaria Organisasi Internasional Independen Global Rep." 3(3).
- [27] Priyanto, Andri Faizal, and Agus Bandiyono. 2024. "Analisis Komparasi Penerapan Standar Gri 400 (Social) Pada Laporan Keberlanjutan Sektor Publik Dan Sektor Privat." 5(2): 99–114.
- [28] Purwadi, Ari, Pengadaan Barang, and D A N Jasa. 2019. "Praktik_Persekongkolan_Tender_Pengadaan_Barang_Dan." *Ari Purwadi* 2(2015): 99–113.
- [29] Qisthi, Fadhlialul, and Meutia Fitri. 2021. "Pengaruh Keterlibatan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri) G4." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5(4): 469–84.
- [30] Rambu Ana, Angelina Trimurti, and Linda Lomi Ga. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk)." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9(1): 62–72.
- [31] Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. 2023. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(11): 685–97.
- [32] Romero, Silvia, Silvia Ruiz, and Belen Fernandez-Feijoo. 2019. "Sustainability Reporting and Stakeholder Engagement in Spain: Different Instruments, Different Quality." *Business Strategy and the Environment* 28(1): 221–32.
- [33] Ruscitasari, Zulfatun, Mamluatul Marzuqoh, and Galuh Ratna Mutia. 2025. "Kesiapan Pelaporan Keberlanjutan Pemerintah Daerah : Kepatuhan Standar Gri Di Bantul Dan Sleman (Local Government Sustainability Reporting Readiness : Gri Standard Compliance in Bantul and Sleman)." 4(1): 55–67.
- [34] Sawitri, Aristha Purwanthari, and Mutiara Rachma Ardhiani. 2023. "Tekanan Pemangku Kepentingan, Good Corporate Governance Dan Kualitas Sustainability Report Perusahaan Di Indonesia." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7(1): 26–33.
- [35] Tusiayati, Tusiayati. 2019. "Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bina Akuntansi* 6(2): 66–85